

BAB II

PROFIL INSTANSI TEMPAT MAGANG

2.1 Profile Perusahaan

Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Pemukiman (BP3KP) Jawa III merupakan unit pelaksana di bawah Direktorat Jenderal Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), dengan wilayah kerja meliputi Provinsi Jawa Tengah dan DI Yogyakarta. Untuk melihat logo BP3KP Jawa III dapat dilihat pada Gambar 2.1.



Gambar 2.1 Logo BP3KP Jawa III

2.2 Sejarah Perusahaan

BP3KP Jawa III dibentuk sebagai hasil penggabungan pegawai dan unit kerja dari berbagai instansi terkait, sesuai peraturan Permen PUPR No. 16/2020 tentang organisasi dan tata kerja PUPR, membawahi dua provinsi (Jateng & DIY) sejak itu. Fokusnya mencakup pengelolaan program rumah subsidi, bantuan struktur rumah tidak layak huni (RTLH), rusun rakyat, dan koordinasi teknis dengan pemerintah daerah dan kementerian lainnya.

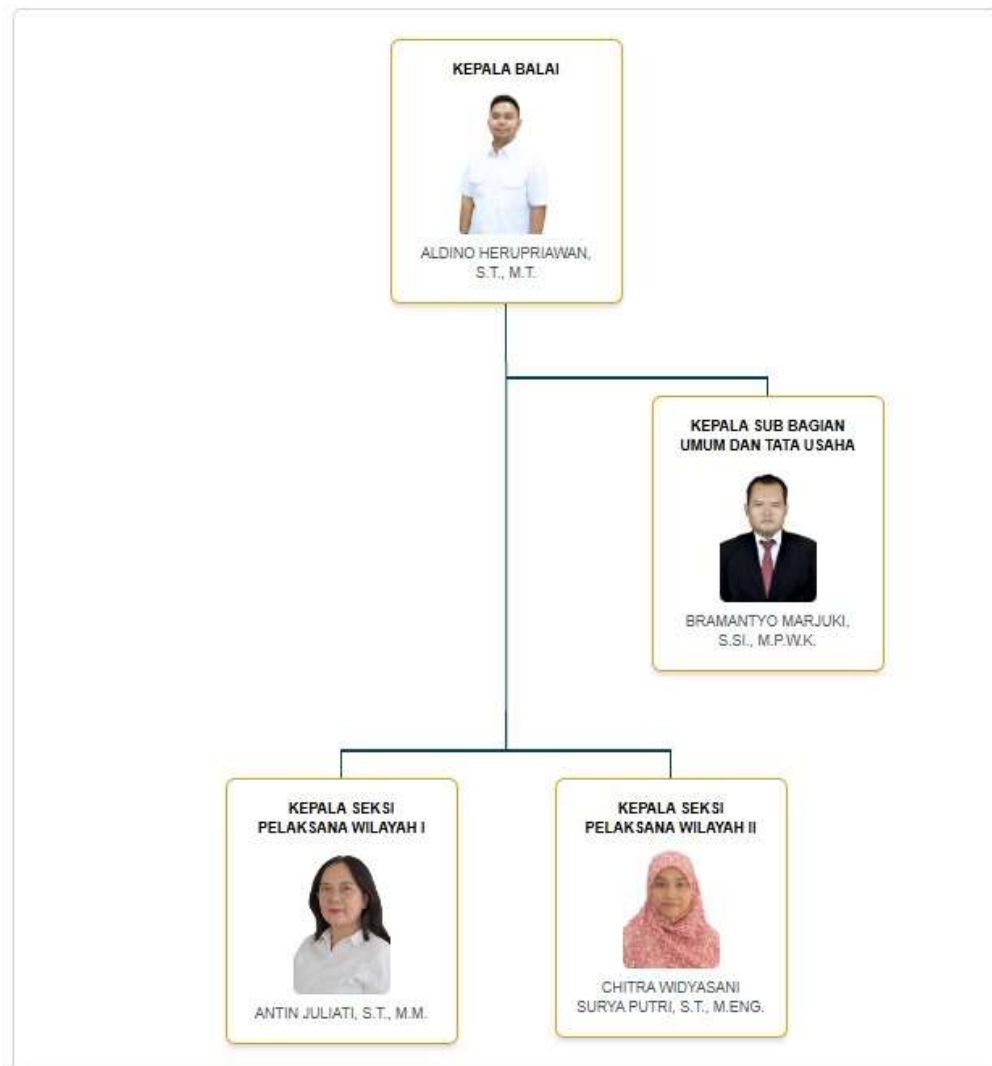
2.3 Struktur Organisasi

Struktur organisasi Balai P3KP Jawa III terdiri atas beberapa unsur pimpinan dan pelaksana teknis, mulai dari Kepala Balai, Sekretariat Umum dan Tata Usaha, hingga Kepala Seksi Wilayah I dan II yang bertanggung jawab terhadap operasional di masing-masing wilayah kerja. Kantor pusat Balai P3KP Jawa III berlokasi di Yogyakarta, dengan cakupan wilayah kerja meliputi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah. Untuk melihat struktur organisasi BP3KP Jawa III dapat dilihat pada Gambar 2.2.



**BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
JAWA III**

PEJABAT STRUKTURAL



Gambar 2.2 Struktur Organisasi

2.4 Deskripsi Tugas Struktur Organisasi

Secara umum, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) Jawa III memiliki tugas melaksanakan pembangunan rumah susun, rumah khusus, rumah swadaya, prasarana, sarana, dan utilitas umum,

serta koordinasi penyediaan lahan dan pengembangan hunian di Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Fungsi-fungsi yang dijalankan oleh balai meliputi penyusunan program dan anggaran, pelaksanaan pembangunan dan pengawasan teknis, fasilitasi bantuan perumahan, hingga pengelolaan data, urusan tata usaha, dan layanan hukum. Masing-masing bagian dalam struktur organisasi memiliki peran yang saling melengkapi dalam mendukung pelaksanaan tugas tersebut sesuai lingkup dan wilayah kerjanya.